

Pengawasan Realisasi Belanja Sosial APBN Melalui Pendekatan Social Watch (Socwatch)

Vianida Hardiningsih¹, Muhammad Arief Nugroho²

¹Pegawai Negeri Sipil Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI

²Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perindustrian RI

*Koresponden: email hvianida@gmail.com

Abstrak: Kesejahteraan umum dan keadilan sosial merupakan cita-cita utama bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dan Pancasila. Dalam upaya mewujudkannya, pemerintah mengalokasikan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program perlindungan sosial (perlinsos). Namun, pelaksanaan perlinsos sering menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidaktepatan sasaran, penyalahgunaan anggaran, dan duplikasi bantuan. Masalah ini menunjukkan perlunya mekanisme pemantauan yang lebih efektif dan transparan dalam memastikan optimalisasi realisasi belanja sosial. Melalui konsep *SocWatch*, aplikasi web pemantau realisasi belanja sosial APBN secara komprehensif dengan analitik data keuangan dan teknologi *machine learning*, cara ini mampu mengidentifikasi pola anomali, mendeteksi potensi penyimpangan, serta menyajikan data dalam format visual yang mudah diakses oleh publik. Fitur pelaporan interaktif dalam *SocWatch* memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan tindak lanjut. Solusi ini diharapkan dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan keuangan negara. Selain itu, *SocWatch* berpotensi menjadi alat strategis dalam mendukung upaya pencegahan korupsi, mempercepat transformasi ekonomi, serta mendorong realisasi belanja sosial yang tepat sasaran demi kesejahteraan yang merata di Indonesia.

Kata Kunci: APBN, perlindungan sosial, *SocWatch*, transparansi, pencegahan korupsi, analitik data keuangan.

Abstract: General welfare and social justice are the main ideals of the Indonesian nation as mandated by the 1945 Constitution and Pancasila. In an effort to realize this, the government allocates funds through the State Budget (APBN) for social protection programs (perlinsos). However, the implementation of perlinsos often faces various challenges, such as inaccurate targeting, budget misuse, and duplication of assistance. This problem shows the need for a more effective and transparent monitoring mechanism to ensure the optimization of social spending realization. Through the SocWatch concept, a comprehensive web application for monitoring the realization of APBN social spending with financial data analytics and machine learning technology, this method is able to identify anomalous patterns, detect potential deviations, and present data in a visual format that is easily accessible to the public. The interactive reporting feature in SocWatch allows the public and stakeholders to actively participate in supervision and follow-up. This solution is expected to strengthen transparency, accountability, and collaboration between the government and the public in managing state finances. In addition, SocWatch has the potential to be a strategic tool in supporting efforts to prevent corruption, accelerate economic transformation, and encourage the realization of targeted social spending for equitable welfare in Indonesia.

Key Words: APBN, social protection, SocWatch, transparency, corruption prevention, financial data analytics

Pendahuluan

Landasan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara telah diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Pancasila sebagai pedomannya. Dalam alenia keempat Pembukaan UUD Tahun 1945 yang secara tersurat menegaskan cita-cita negara dalam rangka memajukan kesejahteraan umum. Dalam Pancasila sila ke-5 pun telah tertuang konsep keadilan yang berwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Kesejahteraan yang bersifat *general* dan keadilan yang merata tanpa terkecuali adalah *fundamental principles* yang menjadi tujuan konkrit Indonesia. Oleh karena itu, negara sejatinya hadir menyediakan terobosan kebijakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Namun, hingga kini konsep kesejahteraan yang menjadi cita-cita bangsa nyatanya masih terus diupayakan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, kesejahteraan masyarakat di tahun 2024 masih cukup timpang meski terdapat sedikit perbaikan dari tahun sebelumnya. Melalui perolehan rasio gini semester I tahun 2024, secara agregat Indonesia meraih angka 0,379. Rasio ini memberikan sinyal positif jika dibandingkan dengan semester I tahun 2023 yang tercatat di angka 0,388. Meski demikian, pemerintah tak boleh cepat berpuas diri karena Indonesia masih



membutuhkan lebih banyak kebijakan strategis untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Sebagai bentuk komitmen atas dasar negara dan amanat konstitusi, beberapa paket kebijakan yang langsung menasar ke masyarakat sebenarnya terus digalakkan. Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagai instrumen penggerak roda perekonomian yang berlandaskan Undang - Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dijelaskan bahwa anggaran ini difungsikan sebagai alat akuntabilitas atas suatu kebijakan dalam mendukung stabilnya pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pendapatan. Setiap tahunnya, APBN, yang mayoritasnya bersumber dari pendapatan sektor perpajakan, digelontorkan sebagai pendanaan berbagai kebijakan.

Salah satunya melalui program perlindungan sosial (perlinsos) yang didalamnya pun meliputi bantuan sosial (bansos). Lebih lanjut, perlinsos dalam Undang - Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial adalah bantuan yang diperuntukkan kepada kategori masyarakat yang mengalami guncangan dan / atau rentan terhadap risiko – risiko sosial yang mengancam. Instrumen ini hadir sebagai bagian program APBN yang disalurkan melalui Satuan Kerja (Satker) pada Kementerian / Lembaga (K / L) Pemerintah Pusat dan / atau Satker Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah (Pemda).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode studi literatur dan analisis data sekunder. Data diambil dari laporan resmi, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Keuangan, dan publikasi ilmiah terkait kebijakan perlindungan sosial. Konsep aplikasi *SocWatch* dirancang berdasarkan analisis sistem pengelolaan data keuangan menggunakan teknologi analitik data dan *machine learning*. Hasil analisis akan disajikan dalam bentuk deskripsi komprehensif untuk mendukung usulan solusi yang diajukan.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan pernyataan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, perlinsos adalah program APBN yang prosesnya telah dibahas bersama DPR dan disahkan melalui undang-undang. Pun menurut rilis Kementeriaannya, alokasi anggaran pada program perlinsos dalam APBN pada tahun 2024 telah mencapai Rp496.800 miliar. Secara rinci, mengutip pula dari Databoks Katadata, program perlinsos disalurkan oleh beberapa K / L dan non – K / L terkait yang meliputi:

1. Kementerian Sosial (Kemensos) sebesar Rp75,6 triliun. Program ini mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) yang diperuntukkan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), bansos pangan sembako untuk 18,8 juta KPM, pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) untuk anak sebanyak 38,4 ribu orang, ATENSI lansia yaitu 32,6 ribu orang, ATENSI penyandang disabilitas sebesar 53,8 ribu orang, dan ATENSI korban penyalahgunaan NAPZA dan ODHIV sebesar 4,7 ribu orang.
2. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebesar Rp49 triliun. Hal ini termasuk bantuan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 96,8 juta peserta penerima bantuan iuran (PBI) dan 49,6 juta untuk peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja.
3. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Agama (Kemenag) sebesar Rp30 triliun untuk Program Indonesia Pintar (PIP) yang dikhususkan bagi 20,8 juta siswa dan 1 juta mahasiswa yang tak mampu.
4. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk bantuan Dana Siap Pakai Bencana. bantuan langsung tunai (BLT) El Nino untuk 18,6 juta KPM.
5. Non - Kementerian / Lembaga (K / L) sebesar Rp330 triliun sebagai subsidi energi dan non energi yang disalurkan melalui eksekutor seperti Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Pertamina.

6. Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa yang mencapai Rp 10,7 triliun.

Dengan berbagai skema penyaluran tersebut, pemerintah sejatinya telah berupaya untuk mengoptimalkan fungsi APBN sebagai *shock absorber* yang melindungi masyarakat dari berbagai ancaman dan tantangan perekonomian. Namun praktiknya, dari tahun ke tahun nyatanya masih sering ditemui beragam tantangan di antaranya terkait ketidaktepatan penyaluran bantuan yang belum terselesaikan.

Merujuk dari laman Ombudsman Republik Indonesia, pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2021, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kesalahan dalam penyaluran bansos pemerintah pada PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Pada tahun 2023, dalam rilis artikelnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun mengakui adanya penyaluran bansos dalam wujud Atensi Anak yang salah sasaran hingga menyebabkan angka stunting di Purwakarta melesat tajam hingga 20% persentasenya.

Dalam LHP BPK RI tahun 2023, permasalahan penyalahgunaan dana bansos masih tak kunjung usai dengan ditemukannya penyaluran bansos Kemensos untuk program sembako sebesar Rp39,14 miliar kepada penerima manfaat yang terindikasi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan keluarganya. BPK juga menemukan bahwa Kementerian Kesehatan melakukan kelebihan pembayaran Rp195,29 miliar karena status peserta yang ganda. Melalui Kemenag, penyaluran juga bermasalah sejumlah Rp12,76 miliar yang terindikasi karena adanya duplikasi bantuan PIP madrasah. Lebih lanjut BPK pun turut melaporkan temuan dari BNPB yang menyalurkan Rp35,95 miliar bantuan stimulan perbaikan rumah akibat gempa di Cianjur yang nyatanya tidak tepat sasaran.

Di tengah berbagai masalah tersebut, pemerintah harus segera mencari solusi dalam perbaikan praktik penyaluran program perlinsos mengingat program ini adalah bentuk upaya dalam merespons masalah sosial yang terjadi di masyarakat secara langsung. Namun, tentunya hal ini membutuhkan terobosan inovasi dan kerja sama dari berbagai pihak utamanya dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai institusi yang berperan penting dalam pencegahan risiko-risiko tindak kecurangan dalam realisasi penyaluran bantuan di lapangan.

Melalui Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019, KPK, dalam menjalankan tugas, sejatinya dapat menetapkan sistem dan berhak atas transparansi laporan dari K / L atau instansi terkait. Peluang ini sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk memperkuat sisi monitoring realisasi belanja APBN khususnya dalam program perlinsos dengan basis data yang diberikan. Lebih lanjut, hal ini dapat menjadi kesempatan untuk mengimplementasikan konsep *Monitoring Corruption for Prevention* (MCP), yang sebelumnya pun telah diinisiasi KPK, dalam memonitor dan mencegah upaya praktik korupsi secara lebih efisien.

Mengutip data dari situs Jaga.id, persentase MCP di tahun 2024 hingga 5 Agustus 2024 masih berkisar di angka 16% secara nasional. Adapun di tahun 2023, MCP hanya mencapai 75,13%. Tentunya perolehan ini masih cukup jauh dari harapan mendekati 100%. Angka ini menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus ditingkatkan guna memudahkan dalam pemantauan risiko dan potensi tindak pidana korupsi yang mungkin terjadi.

Oleh karena itu, melalui jurnal ini, ditawarkan satu ultimate alternative solution sebagai perbaikan monitoring khususnya dalam pengawalan perlinsos. Tersebutlah tentang konsep aplikasi pemantauan belanja sosial APBN bernama SocWatch. Konsep solusi ini dirancang hadir dalam bentuk aplikasi web yang menampilkan realisasi belanja sosial APBN dari instansi terkait untuk dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Realisasi belanja yang ditampilkan tidak hanya memuat data mentah tetapi juga dilengkapi dengan olahan data menggunakan basis analisis data keuangan.

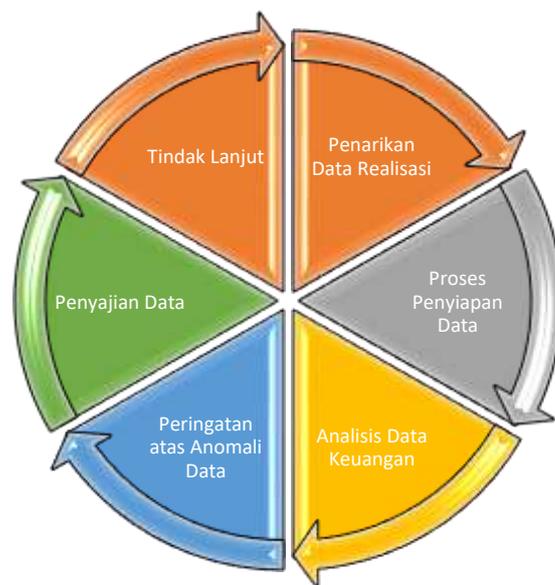
Lebih lanjut, cara kerja **SocWatch** adalah dengan mengumpulkan data keuangan dari realisasi APBN yang bersumber dari permintaan data oleh KPK sesuai fungsi yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini termasuk rincian belanja negara dan transaksi keuangan dari laman realisasi belanja yang utamanya bersumber dari aplikasi Sakti Kementerian Keuangan.

Data keuangan yang telah terkumpul selanjutnya akan melalui proses pembersihan, transformasi, dan penyusunan agar siap untuk dianalisis lebih lanjut.

Dengan menggunakan teknik data analitis seperti analisis data statistik yang dilengkapi dengan *machine learning*; sistem yang menjalankan fungsi algoritma tanpa instruksi, pengguna aplikasi dapat mengidentifikasi pola-pola anomali, *outlier*, atau indikasi potensi korupsi dalam belanja negara. Sebagai contoh sederhana, belanja PKH ditetapkan target realisasinya per triwulan sebesar 25% dari alokasi anggaran. Dengan pantauan data realisasi belanja, besaran realisasi PKH dapat dimonitor apakah telah memenuhi target serta dievaluasi berkala. Jika ternyata terdapat anomali dalam persentase realisasinya di triwulan tersebut, pihak terkait dapat menganalisis lebih dalam dan mencari celah solusi.

SocWatch akan memberikan peringatan dan laporan tentang transaksi atau pola keuangan yang tidak wajar, seperti penyalahgunaan dana, penggelembungan biaya, atau tanda-tanda aktivitas korupsi lainnya. Aplikasi ini juga diproyeksikan dapat menyajikan hasil analisis data keuangan dalam bentuk visualisasi yang mudah dipahami, seperti grafik, *dashboard* interaktif, dan laporan yang memungkinkan pengguna untuk memahami informasi dengan lebih baik. Lebih lanjut, *platform* juga diharapkan dapat memberikan kemampuan untuk memantau data keuangan dalam pos belanja negara secara *real-time* sehingga risiko korupsi dapat dideteksi dan ditindaklanjuti dengan cepat.

Pada muaranya, **SocWatch** disertai fitur pelaporan yang memungkinkan pengguna untuk melaporkan temuan atau indikasi korupsi serta memfasilitasi tindak lanjut dan investigasi kepada pihak yang berwenang atau melalui pengaduan dalam kanal resmi pemerintah seperti Span-Lapor Dengan solusi ini, **SocWatch** diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pengawasan terhadap belanja negara, meminimalkan risiko korupsi, dan memperkuat transparansi dalam pengelolaan keuangan publik.



Grafik terkait Cara Kerja SocWatch

Kesimpulan

Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, belanja sosial yang digelontorkan dari APBN adalah hal krusial yang mendukung aspek kesejahteraan masyarakat. Program perlintas melalui APBN sejatinya adalah kunci perbaikan taraf hidup bagi masyarakat secara menyeluruh. Dengan berbagai tantangan kebutuhan yang semakin mendesak, tuntutan efisiensi dan ketepatan penyaluran, serta polemik realisasi yang tak berkesudahan, pemerintah

membutuhkan alternatif solusi untuk memudahkan kesuksesan program. Dalam hal ini, *platform SocWatch* menjadi relevan.

Kehadirannya menjadi momentum penting dalam pengawasan transparansi penyelenggaraan belanja sosial mengingat masih banyaknya kasus ketidaktepatan penyaluran yang perlu dipecahkan. **SocWatch** ditawarkan sebagai solusi yang memungkinkan pemangku kepentingan, media, hingga masyarakat sipil secara luas mengakses informasi terkini terkait alokasi dan realisasi belanja sosial. Dengan berbagai fiturnya, para pihak pun dapat memantau ketidaknormalan pada realisasi serta melaporkan sebagai upaya tindak lanjutnya. Hal ini tentunya turut berperan positif dalam mendukung *Monitoring Corruption for Prevention* (MCP) yang dalam konteks ini berbasis analisis data keuangan. **SocWatch** kini adalah konsep yang dinanti untuk terealisasi di masa depan. Dalam prosesnya, dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak dalam mewujudkan.

Setidaknya, dengan hadirnya satu solusi ini, terdapat beberapa manfaat strategis yang hendak dicapai. Pertama, terkait transparansi yang dapat memudahkan siapapun dan dimanapun untuk mengakses informasi pengelolaan keuangan negara terutama dari segi belanja sosial. Hal ini menjadi penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kedua, memberikan edukasi kepada masyarakat terkait keterlibatan aktif dalam pencegahan tindak kecurangan dalam di ranah pemerintah khususnya yang berhubungan dengan APBN. Partisipasi publik menjadi hal yang sangat dinantikan sebagai bentuk penguatan peran demokrasi. Ketiga, membentuk jejaring kolaborasi dan komunikasi yang solid antara instansi pemerintah dan antara pemerintah dengan rakyatnya. Akses data dan analisisnya tentu menjadi titik krusial dalam *platform* ini, sehingga koordinasi yang kuat antara instansi satu dengan yang lainnya pun sangat dibutuhkan dalam menyajikan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, keterbukaan publik yang dapat terjalin melalui *platform* dapat menguatkan hubungan kolaboratif antara pemerintah dengan masyarakat sebagai *client* utama.

Meski demikian, tentu **SocWatch** juga menghadapi beberapa tantangan yang perlu diwaspadai. Pertama, dalam hal pengelolaan data yang perlu dilindungi keamanannya dari kejahatan *cyber* yang merajalela. Pemerintah perlu menyiapkan keamanan berlapis yang bekerja sama dengan pihak terkait terutama perihal *back-up* data secara berkala. Kedua, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan data yang disajikan tetap relevan dan sesuai dengan kondisi. Dalam hal ini, pemerintah perlu menyiapkan sumber daya manusia (SDM) secara khusus yang menjalankan peran dalam pengoperasian aplikasi. Ketiga, secara berkala, dibutuhkan peningkatan kapasitas bagi pengguna dalam memahami dan memanfaatkan data. Artinya, edukasi secara komprehensif kepada masyarakat menjadi aspek penting yang tak boleh luput dari pantauan.

Pada akhirnya, keberhasilan **SocWatch** dalam mengawal realisasi belanja sosial APBN sangat bergantung pada upaya serius pemerintah dalam menindaklanjuti alternatif ini. Pemerintah dalam hal ini perlu terbuka terhadap berbagai kritik dan masukan yang diberikan khususnya seperti dalam konteks pemantauan realisasi belanja sosial. Di sisi lain, masyarakat pun perlu lebih pro-aktif dalam memanfaatkan informasi yang diberikan serta memberi *feedback* yang bersifat konstruktif sehingga dapat tercipta ekosistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. 2024. Gini Ratio Menurut Provinsi dan Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTgjMg==/gini-ratio-menurut-provinsi-dan-daerah.html>. Diakses pada 12 Agustus 2024.
- BPK RI. 2023. Laporan Hasil Pemeriksaan. https://www.bpk.go.id/laporan_hasil_pemeriksaan. Diakses pada 13 Agustus 2024.
- Kantor Staf Presiden. 2024. Span Lapor. Lapor.go.id. Diakses pada 15 Agustus 2024
- Kementerian Keuangan. 2024. Sakti. Sakti.kemenkeu.go.id. Diakses pada 15 Agustus 2024
- Komisi VIII DPR RI. 2023. Angka Stunting Purwakarta Capai 20%, Ace Hasan: Penyaluran Bantuan Sosial Harus Tepat Sasaran. [https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/47900/t/javascript](https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/47900/t/javascript;); Diakses pada 13 Agustus 2024.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2024. Progress MCP Jaga.id. <https://jaga.id/jendela-pencegahan/summary?vnk=09556d2f>. Diakses pada 13 Agustus 2024.
- Mukhtaromin. 2024. Belanja Bantuan Sosial dalam Perspektif Keuangan Negara. <https://bppk.kemenkeu.go.id/balai-diklat-keuangan-pontianak/artikel/belanja-bantuan-sosial-dalam-perspektif-keuangan-negara-629774>. Diakses pada 13 Agustus 2024.
- Purnama, Noer Adhe. 2022. Bansos Tidak Tepat Sasaran adalah Maladministrasi. <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkinternal--bansos-tidak-tepat-sasaran-adalah-maladministrasi>. Diakses pada 13 Agustus 2024.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. 2019. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial.
- Republik Indonesia. 2019. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
- Santika, Erlina F. 2024. Anggaran Perlinsos Rp469,8 T, Realisasi Baru 7,6% per Akhir Februari 2024. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/03/26/anggaran-perlinsos-rp4698-t-realisisasi-baru-76-per-akhir-februari-2024>. Diakses pada 13 Agustus 2024.